

Tinjauan Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang: Perspektif Masalah Mursalah

Fitriani Tadete

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128

Email: fitriani.tadete@iain-manado.ac.id

Frangky Suleman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128

Email: frangkysuleman@iain-manado.ac.id

Syahrul Mubarak Subeitan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128

Email: syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This research is descriptive qualitative, which aims to see the impact of rising fuel prices on business actors in Belang District, Southeast Minahasa Regency and is analysed through the perspective of Masalah Mursalah. The research approach used in this study is a case study approach, with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data collected results from research at several points, such as the Belang-Manado taxi terminal, Belang Market, and the fishing boat port in Belang sub-district. This study also conducted data analysis and checked the validity of the data. This study obtained data on the impact of the increase in fuel prices on business actors in Belang District, namely the increase in expenses because all needs also increased, reduced customer interest because customers preferred relatively low prices, increased price competitiveness due to hoarding of goods before the increase in fuel prices by business actors who have quite a lot of capital, whose income has decreased because all operational costs have increased, and are forced to look for other jobs to supplement the economy to meet the needs of their family. The government's policy of increasing the price of fuel oil is not in line with the concept of Masalah Mursalah, which aims to prioritise the interests and welfare of the community. The issuance of a policy to increase fuel prices will lead to a more complex problem, namely the increase in the poverty rate because after the increase in fuel prices, many people whose income has decreased compared to before the implementation of the government policy to abolish and increase fuel prices.

Keywords: *Entrepreneur; Fuel Price, Masalah Mursalah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat dampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dan dianalisis melalui perspektif Masalah Mursalah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan hasil penelitian di beberapa titik seperti terminal taksi wilayah Belang-Manado, Pasar Belang, dan pelabuhan kapal nelayan yang ada di kecamatan Belang. Penelitian ini juga melakukan analisis data dan pengecekan keabsahan data. Penelitian ini memperoleh data bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang, yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks, yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikkan harga BBM.

Kata kunci: Harga BBM, Masalah Mursalah; Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Sutjipto mengatakan investasi di Indonesia masih menarik bagi perusahaan asing (Arindya, 2019). Pasalnya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam jadi lahan yang menggiurkan untuk perusahaan internasional. Alhasil, banyak perusahaan global yang menjalin kerja sama dan berinvestasi di dalam negeri (Bahri, 2018). Pertamina sebagai jargon Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan minyak bumi hanya sebagai pajangan dan pemerintah lebih bernafsu memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan asing. Kondisi ini jelas berseberangan dengan konsep negara berkesejahteraan. Noor (2011) mengatakan proses pembangunan ekonomi di segala bidang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Proses perubahan struktural perekonomian seperti perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan merupakan sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak. Ini terjadi pada Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau menghapus subsidi BBM sesuai dengan sebagaimana dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Beragam respon menanggapi kenaikan harga BBM dalam perbincangan sebelumnya tidak menyurutkan langkah pemerintah. Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan pertamax yang non-subsidi naik di harga Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter (Uswah, 2022).

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan jenis bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahan bakar ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, harga BBM di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak dunia. Akibatnya, pemerintah tidak dapat lagi menjual BBM dengan harga yang sama seperti sebelumnya kepada masyarakat. Penjualan BBM dengan harga lama akan menyebabkan beban pengeluaran yang tinggi dari APBN. (Hrp & Aslami, 2022). Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia akan memiliki dampak yang signifikan pada daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan golongan miskin, baik di perkotaan maupun di wilayah pedesaan (Wardani et al., 2022). Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak secara eksponensial terhadap perekonomian Indonesia.

Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan BBM, ditandai dengan adanya kenaikan harga BBM yang signifikan. Situasi ini memberikan beban pada kehidupan rakyat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari (Muhardi, 2005). Jika kita meneliti kondisi perekonomian masyarakat Indonesia secara nasional, jumlah penduduk miskin terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada September 2020, rata-rata setiap rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,83 orang anggota. Dengan demikian, Garis Kemiskinan rata-rata per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp2.216.714,- per bulan. Berbagai krisis, mulai dari krisis moral, krisis moneter, krisis ekonomi, hingga krisis total, telah melemahkan kondisi perekonomian Indonesia dan menyebabkan jumlah penduduk miskin yang mengkhawatirkan di negara ini.

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak tentunya akan membawa dampak bagi pelaku usaha baik usaha mikro maupun makro sehingga para pengusaha mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian secara proporsional terhadap kestabilan harga jasa (Purba et al., 2021). Demikian halnya, apabila terjadi penurunan harga BBM diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian tarif secara proporsional pula (Kurniawati, 2017). Namun masyarakat pemakai jasa mengharapkan, penyesuaian tarif ini hanya terbatas pada perubahan komponen biaya bahan bakar, sehingga tarif yang diperlukan tidak perlu mengalami lonjakan yang tinggi dari tarif sebelum terjadinya kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM di Indonesia telah menjadi peristiwa yang tidak asing, dimulai dari masa kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo. Hanya Presiden Habibie yang tidak meningkatkan harga BBM, bahkan mengurangnya sebesar Rp 200 per liter. Baru-baru ini, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan perubahan harga BBM yang mencuat ke publik melalui berita televisi dan media sosial. Sejak 1 April 2022, harga BBM Pertamina telah meningkat dari Rp 9.000-9.400 per liter menjadi Rp 12.500 per liter. Data yang dicatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa BBM Peralite merupakan jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh pengendara, mencapai sekitar 23 juta kilo liter sepanjang tahun 2021. Penggunaan BBM Peralite ini mencatat lebih dari 79 persen dari total penggunaan jenis bahan bakar mesin lainnya, seperti Pertamina, Pertamina Turbo, dan Premium, yang hanya mencatat sekitar 21 persen penggunaannya (Hrp & Aslami, 2022).

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berulang kali tidak hanya menimbulkan beban yang lebih berat bagi masyarakat kecil, tetapi juga bagi pelaku usaha (Radhi, 2008). Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional yang menyebabkan peningkatan biaya secara keseluruhan, yang kemudian mengakibatkan kenaikan harga. Situasi ini menciptakan polemik antara masyarakat pengguna jasa dan para pengusaha, di mana para pengusaha berharap penyesuaian tarif dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan pada seluruh komponen biaya pembentukan tarif secara proporsional.

METODE

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan berlokasi di Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data. Data primer, yaitu pengambilan data secara langsung melalui wawancara dengan pelaku taksi wilayah Belang-Manado baik sopir maupun penumpang, pedagang pasar, dan nelayan di Kecamatan Belang yang merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Data sekunder, yaitu data dari dokumentasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Data ini peneliti peroleh dari pengambilan dokumen melalui jurnal atau tulisan dan dokumentasi gambar dari berbagai aktivitas terkait masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi struktur dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini didasarkan pada data yang diperoleh, kemudian digunakan untuk mengembangkan pola hubungan tertentu. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data, display data, dan verifikasi (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak signifikan pada beban kehidupan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga perusahaan besar. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan peningkatan harga barang-barang lain yang mengakibatkan penurunan daya produksi dan daya beli masyarakat. Akibatnya, produksi dan pembelian menjadi terhambat, yang berdampak pada menurunnya perekonomian negara dan kesulitan dalam meningkatkan perekonomian (Wahyudi, 2007). Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadapi kenaikan harga BBM dengan cara mengintervensi pasar agar harga barang lain tidak ikut naik seiring dengan kenaikan harga BBM. Sebagai contoh, belakangan ini, kenaikan harga minyak goreng telah membuat masyarakat menghadapi kesulitan dalam menjalankan perekonomiannya. Tentu saja kenaikan harga BBM di Indonesia bukan berita gembira bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kenyataan ini juga dirasakan oleh pelaku usaha di Kecamatan Belang yang berdampak pada usaha mereka sebagaimana data yang ditemukan di lapangan.

Pertama, dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak tentunya membuat segala macam bahan ikut naik (Latif, 2015). Pembengkakan pengeluaran sopir antar wilayah Belang-Manado terjadi selain dari modal minyak yang di supply memerlukan biaya yang banyak, barang-barang atau onderdil mobil juga perlahan naik. Sama halnya dengan pedagang pasar di kecamatan Belang, jarak tempuh menuju distributor untuk menyetok barang pokok sebagai modal menjadi

bertambah. Belum lagi bahan pokok yang dijadikan sebagai modal awal juga turut naik seperti tahu dan telur. Sementara di kategori nelayan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak, membuat para nelayan selalu bertaruh dengan keadaan. Sebab, penggunaan bahan bakar minyak sebagai supply keberangkatan tentunya sangat banyak diperlukan. Sementara itu, belum tentu juga akan langsung mendapatkan ikan. Ketika nelayan sudah sampai tempat pelepasan jala ikan dan melepas jarring namun ikannya tidak tertangkap, disitulah kerugian hadir di depan mata para nelayan. Sebab, penggunaan bahan bakar minyak pada usaha nelayan merupakan salah satu modal yang cukup tinggi diperlukan, apalagi dengan keadaan harga minyak saat ini yang meningkat 25%. Jadi, dampak kenaikan harga BBM terhadap para nelayan tentunya sangat terasa, sebab dengan penggunaan minyak berlebih namun tidak mampu membuahkan hasil, maka itu terhitung hutang bagi para nelayan yang pada akhirnya terjadi pemotongan yang cukup besar di saat pembagian hasil. Belum lagi naiknya harga sembako yang membuat para pelaku usaha memerlukan tambahan lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Kedua, pada wilayah transportasi di kecamatan Belang khususnya penggunaan taksi Avanza atau sejenisnya akhir-akhir ini pendapatan mulai menurun, ini diakibatkan oleh penumpang yang lebih memilih transportasi lain lebih murah seperti Bus antar daerah. Padahal biasanya di akhir pekan atau di waktu libur banyak penumpang yang bepergian ke Manado, apalagi di bulan Desember. Ini diakibatkan karena mereka pikir harga tarif cukup mahal, jadi mereka lebih memilih menaiki Bus antar daerah. Selain itu, pelanggan yang biasanya menyewa mobil untuk digunakan, kini mulai berkurang. Di pasar, minat pembeli juga mulai berkurang karena dikejutkan dengan lonjakan harga barang yang cukup signifikan. Kenyataan ini membuat pedagang mengkhawatirkan barang dagangan yang massanya cepat kadaluarsa dan tentunya akan mengalami kerugian yang cukup banyak.

Ketiga, naiknya harga BBM juga berdampak kepada daya saing antar pelaku usaha. Pada wilayah transportasi atau taksi di kecamatan Belang, persaingan itu terlihat dari sikap penumpang yang lebih memilih Bus antar daerah yang memiliki ongkos tarif yang lebih murah ketimbang ongkos taksi Avanza. Sama halnya dengan pedagang pasar. Persaingan terlihat dari pelaku usaha menengah atas yang telah memiliki stok barang yang cukup banyak membuat pelaku usaha dagang kecil merasa rugi karena bahan pokok yang pelaku usaha menengah kebawah hanya bermodalkan sedikit, sementara pelaku usaha menengah ke atas memiliki modal yang banyak sehingga lebih leluasa menyetok barang yang disimpan. Apalagi sewaktu isu kenaikan harga BBM berhembus di tengah masyarakat, pelaku usaha kelas menengah atas mulai menimbun barang untuk dijual nanti setelah harganya naik berlipat-lipat.

Keempat, pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diusahakan. Namun sejak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pendapatan yang diterima oleh beberapa pelaku usaha baik sopir, pedagang dan nelayan di bulan berikutnya telah berkurang. Ini berakibat selain biaya operasional meningkat,

kebutuhan pokok juga ikut naik sehingga modal yang dikeluarkan tidak menutupi hasil yang didapatkan.

Kelima, dampak selanjutnya yang dirasakan oleh pelaku usaha di kecamatan Belang adalah terpaksa mencari pekerjaan lain demi menambah pemasukan untuk kebutuhan hidup. Pelaku usaha yang terdampak akibat naiknya harga BBM harus menyisihkan waktu untuk kerja serabutan demi menambah pendapatan untuk keperluan hidup. Kerja ini dimanfaatkan ketika ada waktu luang dan pas untuk bekerja di samping sebagai nelayan maupun sopir.

Peningkatan harga BBM akan paling terasa dampaknya pada berbagai sektor usaha kecil karena beban produksi menjadi semakin besar. Modal yang terbatas tentunya sulit akan menutup biaya produksi yang kian meroket lambat laun akan membuat bisnis kecil terpuruk dan gulung tikar. Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit bisnis kecil yang menggunakan kendaraan untuk operasional harian. Ini misalnya mengantar *order*, mengambil pesanan, belanja bahan baku ke *supplier*, dan sejenisnya. Dampak kenaikan BBM bagi mereka salah satunya adalah makin membengkaknya ongkos operasional. Selain biaya operasional naik, usaha kecil juga harus menghadapi berbagai permasalahan lain sebagai imbas kebijakan ini.

Konsep Masalah Mursalah dari Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang

Tahun 2022 mengejutkan masyarakat Indonesia dengan berita tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kabar ini telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya berusaha mensejahterakan rakyat. Kenaikan harga BBM yang mendadak ini membuat rakyat bingung dan merasa keputusan ini diambil tanpa pertimbangan yang cukup.

Banyak asumsi negatif muncul di masyarakat akibat berita kenaikan BBM ini. Beberapa orang percaya bahwa kenaikan BBM ini sengaja digunakan sebagai upaya untuk menutup-nutupi isu-isu yang telah mencuat, seperti penundaan pemilihan presiden dan kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Mantan Irjen Ferdi Sambo. Mereka beranggapan bahwa kenaikan BBM ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasus tersebut dan mencoba menghilangkan citra buruk bagi partai atau lembaga terkait. Asumsi-asumsi ini muncul secara wajar dan tidak dapat dihindari. Perdebatan mengenai kenaikan BBM menciptakan kelompok yang mendukung, netral, dan menentang dengan alasan masing-masing.

Kenaikan BBM ini bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh pemerintah, bahkan sudah terjadi beberapa kali sejak Presiden Soeharto menjabat sampai pada pemerintahan hari ini. Namun, dengan kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah juga mengupayakan agar bentuk penyaluran dana tunai kepada masyarakat terdampak akan terealisasi. Namun sampai sejauh ini masyarakat masih ada yang belum menerima bantuan tersebut, hal ini sebagaimana kenyataan yang dirasakan oleh pelaku usaha di kecamatan Belang. Menurut masyarakat apa yang disampaikan oleh Presiden merupakan suatu pencitraan politik agar terlihat

pemerintahan beserta jajarannya empati atas kesengsaraan rakyat dalam suatu teori komunikasi media.

Kebijakan klise dari pemerintah dan upaya pencitraan yang dilakukan oleh presiden menyebabkan masyarakat semakin marah, yang akhirnya berujung pada terjadinya demonstrasi massal di berbagai lokasi jalan besar di Indonesia, baik di ibukota maupun daerah-daerah. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam demonstrasi ini tanpa memandang gender, jabatan, atau status sosial. Bahkan kaum intelektual seperti mahasiswa juga turut ambil bagian untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

Kemarahan ini berasal dari ketidakpuasan kaum yang merasa lelah dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan nasib mereka di masa depan. Masyarakat merasa pemerintah seringkali lalai dalam menjalankan tugasnya dan hanya memberikan janji-janji palsu. Meskipun demikian, kebijakan yang telah dilakukan sudah terjadi dan masyarakat menengah ke bawah lah yang lebih merasakan dampaknya, terutama bagi masyarakat pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan bahan bakar minyak.

Sesuai dengan fakta yang didapatkan, akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pelaku usaha di kecamatan Belang sangat merasakan dampaknya. Melalui usaha dari berbagai jenis kategori sebagai sopir, pedagang dan nelayan, pelaku usaha tersebut umumnya mengalami pendapatan yang menurun dari sebelumnya. Menurunnya pendapatan tersebut akibat dari naiknya harga BBM sehingga bahan pokok ikut naik, operasional bertambah, daya saing meningkat, membengkaknya pengeluaran yang pada akhirnya terpaksa mencari alternatif kerja lain sebagai serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Jika dikaji dari kajian hukum Islam dengan menggunakan pendekatan dan metode Masalah Mursalah, tentunya ini bertentangan dengan tujuan yaitu mensejahterakan hidup masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa konsep Masalah Mursalah merujuk pada penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak memiliki dukungan secara rinci dari dalil nash, tetapi didukung oleh makna dari beberapa nash. Metode Masalah Mursalah merupakan hasil dari proses induksi yang menggunakan logika dari sejumlah nash, tidak seperti metode qiyas yang berlandaskan pada nash parsial (Qorib & Harahap, 2016). Al-Ghazali dalam kitabnya, *al-Mustashfa*, menjelaskan bahwa Masalah Mursalah adalah segala sesuatu (masalah) yang tidak memiliki bukti yang spesifik dari syariat dalam bentuk nash yang menetapkannya atau membatalkannya, dan tidak ada petunjuk yang menjelaskannya (Harun, 2022). Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang serupa, yaitu "masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak memiliki petunjuk khusus yang menyatakan tentang pengakuan atau penolakannya". (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Imam Malik menetapkan tiga syarat teologis untuk benar-benar menggunakan metode masalah mursalah tanpa penyalahgunaan. *Pertama*, ada kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok masalah universal (*ushul*) tanpa bertentangan dengan dalil-dalil yang pasti (*qath'i*), sehingga

sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan syariat meskipun tidak secara eksplisit disebutkan oleh satu dalil pun (Subeitan & Muthahhar, 2020). *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus selaras dengan akal sehat, yang berarti sesuai dengan paradigma masalah yang dapat diterima secara umum oleh para ahli logika (Roiqoh, 2013). *Ketiga*, dalam penerapannya, masalah tersebut harus dapat menghilangkan kesulitan yang akan dihadapi jika tidak diterapkan, sehingga manusia akan mengalami kesulitan jika masalah tidak diberlakukan (Nasution & Nasution, 2020).

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal dengan pertimbangan bahwa dapat menghasilkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal tersebut juga sejalan dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syariat tersebut tidak memiliki petunjuk syariat secara khusus yang menolaknya atau mengakuinya (Yanti, 2022). Jadi, dengan melihat fakta di lapangan terhadap kondisi masyarakat khususnya pelaku usaha di kecamatan Belang, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang di antaranya yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikkan harga BBM.

REFERENSI

Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam

- penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63–75.
- Arindya, R. (2019). *Efektivitas organisasi tata kelola minyak dan gas bumi*. Media Sahabat Cendekia.
- Bahri, N. A. (2018). Bumi dan corporate social responsibility. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 37–48.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577.
- Hrp, G. R., & Aslami, N. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1464–1474.
- Kurniawati, L. (2017). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Environmental Tax. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 57–66.
- Latif, A. (2015). Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan bahan Pokok di pasar Tradisional. *Al-Buhuts*, 11(1), 91–116.
- Muhardi, M. (2005). Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(4), 156091.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2).
- Purba, B., Albra, W., Rahman, A., Purba, P. B., Nugraha, N. A., Irawati, H. M., Syafii, A., Damanik, E. O. P., & Fajrillah, F. (2021). *Ekonomi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 55–80.
- Radhi, F. (2008). *Kebijakan ekonomi pro rakyat*. Penerbit Republika.
- Roiqoh, S. (2013). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam Konsep Masalah Mursalah Dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012)*. Universitas Islam Indonesia.
- Subeitan, S. M., & Muthahhar, A. (2020). Qath'y Dan Zhanny Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 139–162.
- Uswah. (2022). *BBM Naik, Pakar Ekonomi UM Surabaya: Ini Dampaknya bagi Masyarakat Menengah ke Bawah*. UM Surabaya.
- Wahyudi, H. (2007). Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Keluarga Miskin Pasca

Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM):(Studi Kasus Terhadap Keluarga Miskin di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Medan). *Jurnal Harmoni Sosia*, 1(2).

Wardani, W., Suriana, S., Arfah, S. U., Zulaili, Z., & Lubis, P. S. (2022). Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Implikasinya Terhadap Makroekonomi di Indonesia. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(3), 63–70.

Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312–326.